Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi VI
Minggu ke-3 Februari
(11 s.d. 17 Februari 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DAMPAK KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG DAN KEDELAI DI DUNIA

Lisnawati
Peneliti Muda
lisnawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Harga kedelai dunia melonjak tinggi sehingga berpengaruh terhadap harga kedelai impor yang merupakan bahan baku untuk produk tahu dan tempe. Kenaikan harga kedelai ini terjadi di tengah masih tingginya harga minyak goreng di dalam negeri.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengatakan, harga kedelai dalam bursa berjangka *Chicago Board of Trade* (CBOT) pada pekan pertama Februari 2022 mencapai 15,77 dollar AS per gantang. Harga kedelai tersebut diperkirakan akan terus naik sampai bulan Mei 2022. Hal ini menyebabkan harga kedelai di tingkat importir Indonesia pada pekan pertama Februari 2022 tembus Rp.11.240 per kilogram (kg).

Lonjakan harga kedelai dunia disebabkan produksi dan pasokan kedelai dunia dari Argentina dan Brazil berkurang karena kekeringan di wilayah Amerika Selatan. Produksi kedelai Brazil dan Argentina pada masa panen September 2021-Agustus 2022 diperkirakan masing-masing hanya sebanyak 134 juta ton dan 45 juta ton. Kondisi ini membuat produksi kedelai dunia berkurang 8,7 juta ton menjadi 363,9 juta ton. Faktor lainnya yang turut mendorong harga kedelai dunia adalah inflasi di Amerika Serikat yang mencapai 7 persen, kekurangan tenaga kerja akibat pembatasan sosial di negara produsen, kenaikan biaya lahan, dan anomali cuaca.

Selain itu, menurut Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), kebutuhan kedelai pengrajin tempe dan tahu per tahun sekitar 3 juta ton. Dari jumlah tersebut, 80 persen dipenuhi dari impor. Jadi, ketika harga kedelai impor naik, maka pengrajin yang sebagian besar adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau industri rumah tangga akan ikut terimbas.

Selain dihadapkan dengan harga kedelai yang meningkat, pasokan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih belum lancar. Salah satunya disebabkan oleh tersendatnya produksi sejumlah pabrik minyak goreng yang tidak terintegrasi dengan industri perkebunan kelapa sawit. Tingginya harga minyak kelapa sawit mentah membuat pabrik minyak goreng kekurangan pasokan.

Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), tingginya harga *crude palm oil* (CPO) internasional, sekitar Rp. 15.000 per kg, membuat 10 pabrik minyak goreng yang tidak terintegrasi dengan industri perkebunan sawit tidak dapat berproduksi. Hal ini dikarenakan tidak ada CPO yang bisa dibeli oleh 10 pabrik minyak goreng tersebut di harga Rp. 9.300 per kg (sesuai harga patokan *domestic market obligation* atau DMO). Kondisi ini menyebabkan kelangkaan minyak goreng di masyarakat.

Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng sawit, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Berdasarkan peraturan tersebut, harga minyak goreng curah ditetapkan Rp. 11.500 per liter, harga minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp. 13.500 per liter, dan harga minyak goreng kemasan premium sebesar Rp. 14.000 per liter. Namun, ketersediaan minyak goreng sawit dengan harga sesuai peraturan tersebut masih sulit ditemukan baik di toko, pasar tradisional, pasar modern, maupun minimarket.

Konsekuensinya, pedagang tidak mau rugi ketika ia sudah terlanjur membeli minyak goreng dengan harga tinggi. Pedagang tersebut tidak akan menjual produknya dengan harga murah. Akibatnya, secara umum harga-harga di pasaran masih tetap tinggi.

Atensi DPR

Seiring meningkatnya harga kedelai dan sawit di dunia, Pemerintah perlu memperhatikan dampaknya ke masyarakat. DPR RI, khususnya dalam hal fungsi pengawasan harus mengawasi harga komoditas tersebut di pasaran. Harga kedelai impor yang tinggi dapat diatasi dengan cara:
1.memproduksi kedelai di dalam negeri; dan
2.mengatur stok kedelai impor.

Distribusi minyak goreng juga perlu diawasi. Meskipun pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi, namun ketersediaan barang di pasar juga harus dipastikan. Bagaimanapun, Indonesia sebagai produsen CPO tiga besar di dunia, seharusnya dapat menjadi pemain utama dalam menentukan harga komoditas tersebut, namun kenyataannya tidaklah demikian.

Komisi VI DPR RI perlu meningkatkan fungsi pengawasannya kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan agar dapat menjalankan kebijakannya dengan baik. Pengawasan Komisi VI DPR RI tersebut penting guna memastikan minyak goreng dan kedelai terdistribusi dengan baik dan dijual dengan harga sesuai aturan.

Sumber

kompas.com, 12 Februari 2022
Kontan, 13 Februari 2022
Media Indonesia, 12 Februari 2022

IsuSepekan
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Mandala Harefa, Sri Nurhayati Q., Riyadi Santoso, Rasbin, Edmira Rivani
Kesra Achmad Muchaddam F., Yulia Indahri, Rahmi Yuningsih

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S.
Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake
Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official
©PuslitBK2022